

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDAMPINGAN KEGIATAN PUSAT DAN
PROVINSI BIDANG P2HP

DISUSUN OLEH

DEKI RAVINO, S.Pt

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk Memfasilitasi kegiatan Kementerian dan Provinsi yang ada di kabupaten Pesisir Selatan. Memfasilitasi kelompok dan Poklahsar dalam mengajukan proposal bantuan ke kementerian dan Provinsi, melakukan monitoring bantuan Kementerian dan Provinsi kepada kelompok dan Poklahsar yang telah menerima bantuan Pusat dan Provinsi.

Selain fasilitasi bantuan oleh pemerintah Pusat dan Provinsi kepada kelompok, kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP pada tahun 2019 juga memfasilitasi pelaksanaan Survei Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga bulanan yang merupakan program Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di kabupaten Pesisir Selatan sampel yang ditetapkan yaitu kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Linggo Sari Baganti, IV Nagari Bayang Utara dan Kecamatan Bayang.

Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/124/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Revisi Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/08-KPTS/DISKAN-PS/III/2018 Tentang Revisi Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Perikanan No.2.00.01.2.00.01.26.28.5.2 Tahun 2019

1.2 Tujuan

- a. Melakukan Monitoring dalam meningkatkan pemanfaatan bantuan yang diterima POKLASAR maupun pelaku usaha Perikanan yang telah menerima bantuan alat pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Memberikan informasi kepada kelompok usaha perikanan dalam susunan administrasi kelompok serta petunjuk mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan pusat dan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Sasaran

Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) hasil Kelautan dan Perikanan, dan Koperasi Perikanan.

1.4 Output

Tertibnya Administrasi dan Teknis kegiatan pusat dan provinsi oleh Kelompok Pelaku usaha Perikanan (POKLAHSAR)

1.5 Out Come

1. Terlaksananya kegiatan Pusat dan Provinsi bidang P2HP.
2. Termanfaatkannya bantuan Pusat dan Provinsi oleh kelompok penerima untuk pengembangan usahanya.
3. Adanya laporan hasil pemanfaatan bantuan oleh kelompok penerima.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Tabel.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Jadwal kegiatan											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Identifikasi dan Verifikasi Poklahsar/Koperasi calon penerima bantuan												
2	Pendampingan pelaksanaan kegiatan Pusat dan Provinsi												
3	Survei angka konsumsi ikan rumah tangga bulanan												
4	Monitoring Kegiatan Pusat dan Provinsi												

2.2 Realisasi Keuangan dan Fisik

Tabel. 2 Realisasi keuangan dan Fisik Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP	39.260.000	38.424.700	97,87	100

Tabel. 3 Realisasi Bantuan Pusat dan Provinsi kepada Koperasi/Poklahsar tahun 2019

No.	Jenis Bantuan	Kelompok Penerima	Alamat	Ketua
1	Chest Freezer	1. Poklahsar Kato Saiyo	Nag. Pasia Palangai Kec. Ranah Pesisir	Martinis
		2. Poklahsar Pengasapan Bersama	Muaro Sakai Kec. Pancung Soal	Jhoni Hendri
2	Ice Flake	1. Koperasi Perikanan Suci Samudera	Nag. Air Haji Barat Kec. Linggo Sari Baganti	Junaidi
		2. Poklahsar Cemara Laut	Nag. Punggasan Utara Kec. Linggo Sari Baganti	Basri
		3. Poklahsar Pantai Samudera	Nag. Muara Kandis Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	Yusmal

III. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

3.1 Permasalahan

1. Kurangnya kelengkapan administrasi kelompok untuk mengajukan bantuan Ke Pemerintah Pusat maupun provinsi
2. Kurangnya kreatifitas kelompok dalam pengembangan usahanya
3. Rendahnya sdm dalam pembuatan proposal bantuan
4. Rendahnya sdm dalam pembuatan laporan pemanfaatan bantuan
5. Minimnya Informasi bantuan dari pemerintah
6. Rendahnya keinginan dalam pengurusan Kelembagaan Kelompok

3.2 Pemecahan Masalah

1. Melakukan Pembinaan Kelompok secara berkesinambungan
2. Pemberdayaan dalam meningkatkan sdm Kelompok
3. Memberikan informasi kepada kelompok melalui penyuluh mengenai program bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Pendampingan kegiatan pusat dan provinsi Bidang P2HP telah terlaksana dengan melakukan pembinaan dan monitoring kepada kelompok pengolah dan pelaku usaha perikanan dengan meningkatkan kelembagaan dalam bentuk badan hukum atau koperasi. Beberapa Kelompok sudah melakukan pengurusan Badan Hukum dalam bentuk Akte notaris dan Koperasi dan sebagian yang belum berbadan hukum karena alasannya tidak adanya waktu biaya dalam pengurusan Koperasi atau akte notaris. Pembinaan monitoring dan evaluasi yang sangat perlu dilakukan kepada Poklamsar yang menerima bantuan dari Pusat maupun dari Provinsi.

B. Saran

Untuk melakukan peningkatan kelembagaan kelompok dalam bentuk badan hukum atau koperasi perlu dilakukan kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pemberdayaan Kelompok dalam meningkatkan kelembagaan yang berbadan hukum atau koperasi
- Penyuluhan Tentang Kelembagaan Kelompok
- Fasilitasi dalam Pengurusan kelembagaan Kelompok
- Kelompok harus membuat laporan hasil pemanfaatan bantuan setiap bulan.
- Pemanfaatan paket bantuan yang diberikan oleh Pusat dan Provinsi perlu dilaksanakan monitoring secara berkala.

Demikian laporan ini disampaikan, atas saran dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Painan, Desember 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

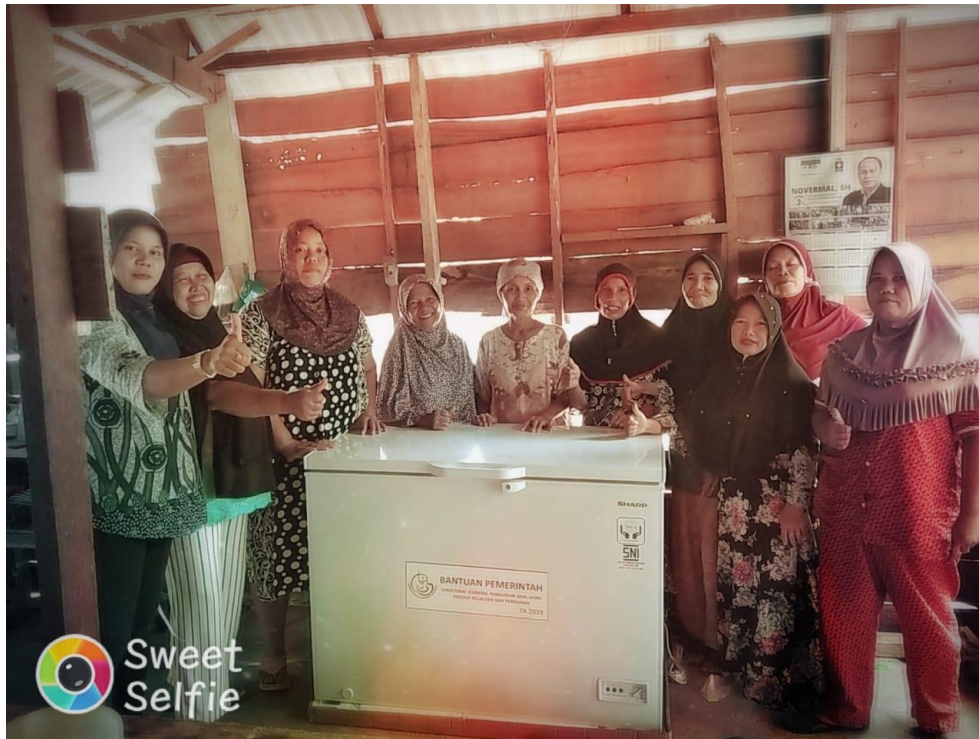


PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


DEKI RAVINO, S.Pt
NIP. 19841215 200902 1 005

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP

I. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Chest Frezer



II. Dokumentasi Bantuan Ice Flake Machine



III. Dokumentasi Survei Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga bulanan

